

# RENCANA STRATEGIS 2017-2022



2018 Kantor Camat Larantuka

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2017-2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

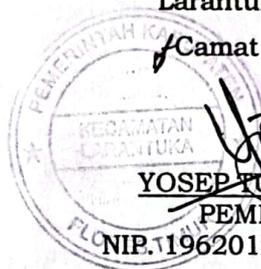
Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Larantuka untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Larantuka serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2017 – 2022 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Larantuka di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Larantuka, Januari 2018

Camat Larantuka,



YOSEP TUA DOLLU, SP

PEMBINA TK.I

NIP.19620126 198603 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	13
<b>BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>15</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	15
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih	17
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	19
<b>BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>22</b>
4.1 Visi dan Misi SKPD	22
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	22
<b>BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>23</b>
<b>BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>25</b>
<b>BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>26</b>
<b>BAB 8. PENUTUP</b>	<b>27</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1) penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu tahap dengan tahap yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran program dan kegiatan pembangunan.

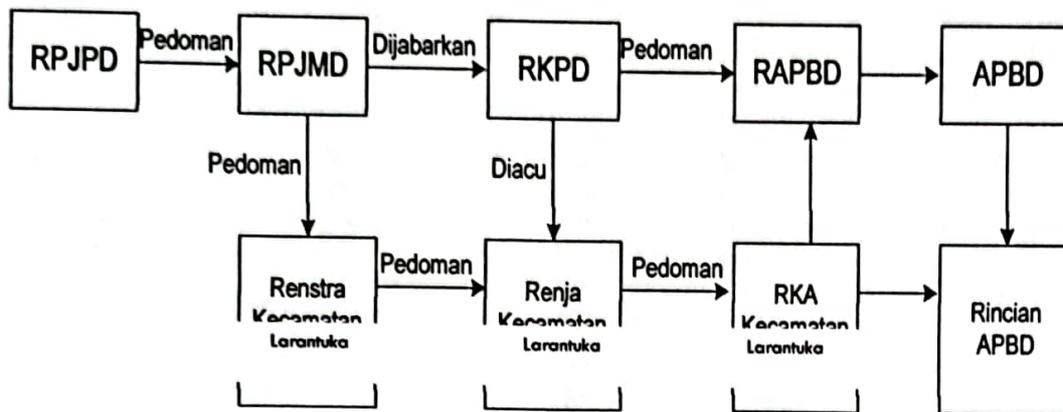
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja SKPD terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Larantuka sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017-2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 (PERDA Nomor 10 Tahun 2017). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis

baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang perencanaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Larantuka merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan.



Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Larantuka Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor <sup>2</sup>65 Tahun <sup>2012</sup>2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor <sup>12</sup>39 Tahun <sup>2014</sup>2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun <sup>11/2016</sup>2008 <sup>→ 2/2019</sup> tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
15. Peraturan <sup>Bupati</sup> Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0151); <sup>Rencana Pemb Daerah Tahun 2023-2026</sup>
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).

### 3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :
  1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Larantuka selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
  2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :
    1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;
    2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
    3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Larantuka yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
    4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparaturnya Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
    5. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparaturnya Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah sebagai berikut:

Bab1. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparaturnya, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3. Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab 4: Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkaitan Misi, Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larantuka.

Bab 5: memuat strategi dan arah kebijakan.

**Bab 6: memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

**Bab 7: Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,**

**Bab 8. Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

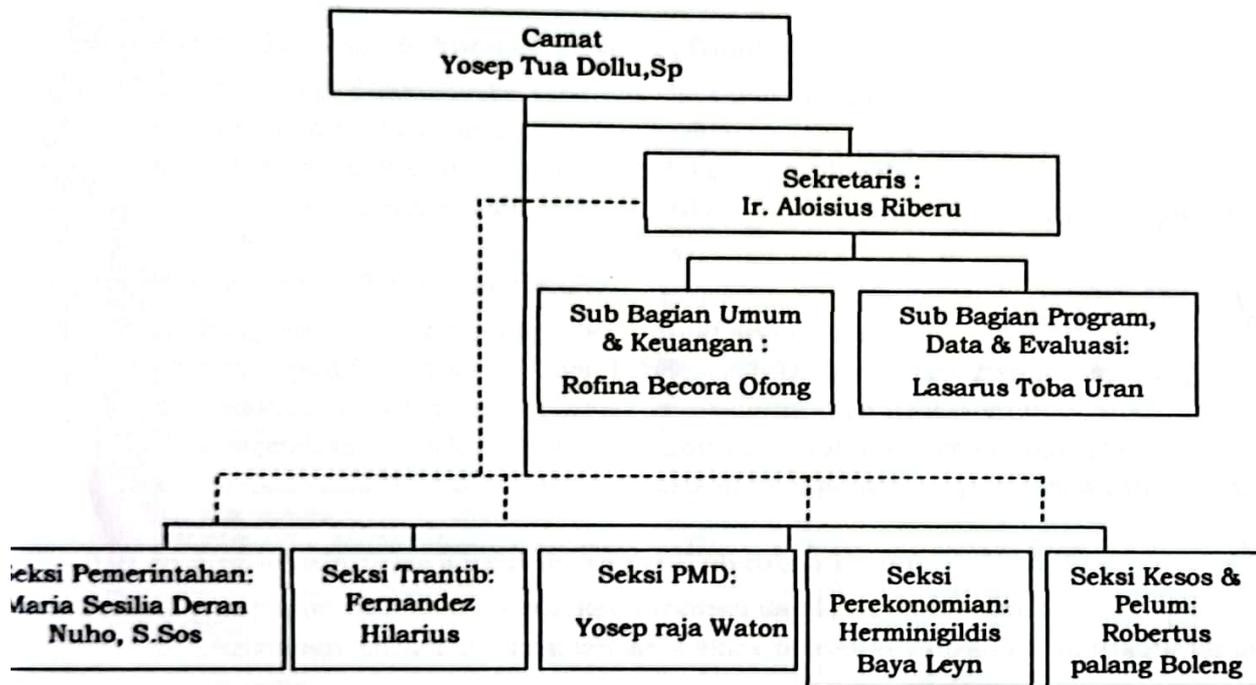
#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Larantuka

Secara Administrasi Kecamatan Larantuka terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 20 Juli 1963 No. Pem. 66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan di seluruh propinsi NTT, termasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores Timur ditingkatkan menjadi 13 kecamatan, dan 3 diantaranya adalah kecamatan :

1. Kecamatan Larantuka dengan Ibu Kota Larantuka.
2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan
3. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Larantuka dipimpin oleh seorang Camat, seorang sekretaris, 5 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 11 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Larantuka sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

#### 1. Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
  - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. Penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
  - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
  - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
  - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
  - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
  - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
  - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
  - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
  - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
  - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :
  - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
  - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
  - a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
  - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kepala Seksi Perekonomian :
- Penyusunan rencana kerja perekonomian;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
  - Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
  - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Larantuka

### a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Larantuka berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2017.

Tabel 2.2.2 :

Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
2.	Pembina	IV.a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III.d	2 orang
4.	Penata	III.c	3 orang

5.	Penata Muda Tingkat I	III.b	1 orang
6.	Penata Muda	III.a	3 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II.d	1 orang
8.	Pengatur	II.c	7 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	1 orang
Jumlah			20 orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2017.

Tabel 2.2.3 :  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	5 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
4.	Diploma I/Diploma II	-
5.	SLTA	15 orang
JUMLAH		20 Orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2017.

Tabel 2.2.4 :  
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 orang
JUMLAH		2 Orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2017.

b. Aset

Tabel 2.2.5  
Asset/Modal Kantor Camat Larantuka

No	Uraian Asset/Modal	Nilai (Rp)
1	Tanah	545.721.000
2	Peralatan dan Mesin	720.458.000
3	Gedung dan Bangunan	508.500.000

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Larantuka

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Larantuka terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Larantuka

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi

motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Larantuka, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

#### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Larantuka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal

Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparaturnya dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparaturnya dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparaturnya	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparaturnya dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pem.
Kapasitas SDM aparaturnya dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparaturnya yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparaturnya dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparaturnya yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	kketersediaan dan perhatian para aparaturnya medis dan paramedis sertaketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka keterbatasan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

### 3.2. Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah **"Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata"**.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

- 1. Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- 2. Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

- 1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
- 2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang

- terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
  4. **Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
  5. **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Larantuka berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Bingaki Desa Membangun Kota Menata "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Reformasi Birokrasi			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektifitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Kurang maksimalnya dana yang terserap dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana yang disediakan demi terselenggaranya kegiatan Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

### 3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Fakfor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	- Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang kota	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

### 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

**Isu-isu strategis** pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Larantuka maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Larantuka perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

#### 3.4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
2. Adanya pedoman dan juknis	2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.
3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing	3. Sarana prasarana kantor kurang memadai
4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.	4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun).
5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.	5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	6. Belum adanya (diberlakukannya)

	<p>rewards maupun punishment terhadap aparaturnya kecamatan maupun aparaturnya Kelurahan dan Desa yang melakukan pelanggaran;</p> <p>7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah Kelurahan dan Desa dalam memberikan pelayanan;</p> <p>8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;</p> <p>9. Perilaku masyarakat belum mendukung program</p>
<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya.</li> <li>2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan di kecamatan.</li> <li>3. Adanya program utama "Gerbang Emas, Anggur Merah"</li> <li>4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab</li> <li>5. Kemajuan teknologi.</li> <li>6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya).</li> <li>7. Terjalinnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.</li> <li>8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas aparaturnya desa yang masih rendah</li> <li>2. Potensi SDA yang belum tergali.</li> <li>3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar.</li> <li>4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat pengangguran usia muda.</li> <li>5. Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.</li> <li>6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik;</li> <li>7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan, pelayanan publik harga pasar yang tinggi</li> </ol>

### 3.4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larantuka lima tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparaturnya. Keberadaan aparaturnya merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparaturnya yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparaturnya dan penambahan jumlah aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM aparaturnya Kecamatan;

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

## BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Visi dan Misi SKPD Kantor Camat Larantuka

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Larantuka dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021 yaitu “ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Flores Timur di atas, Visi dan Misi Kecamatan Larantuka adalah

**“ Terwujudnya Kecamatan Larantuka sebagai Kecamatan Yang Unggul dalam Pelayanan, Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat”.**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kecamatan Larantuka sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.
2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Larantuka

Tabel 4.2.1 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Larantuka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
<b>Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.</b>								
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten maupun tingkat Propinsi	0 %	25%	50%	75%	100%
<b>Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.</b>								
5.	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	50%	75%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Larantuka dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan larantuka, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergalai dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
  - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
  - 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
  - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
  - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
  - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
  - 1) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
  - 2) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
  - 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
  - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
  - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
  - 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
  - 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
  - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 4.3.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi : Terwujudnya Kecamatan Larantuka sebagai Kecamatan Yang Unggul dalam Pelayanan, Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
a. Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabilitas	1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
b. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur baik di kecamatan maupun di desa	2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai 3. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas 4. Penegakan aturan yang berlaku
<b>Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.</b>			
Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	1. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai 2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

**BAB VI :**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Larantuka.

*Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini.*

Tabel 5.1  
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,  
Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DIPA Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima.	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal	Kondisi pelayanan, kenyamanan kantor, dan pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan legal	4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi penunjang balanceran pelaksanaan tugas	2010 100%	100%	262,877,024	100%	302,818,450	100%	426,177,925	100%	464,207,720	100%	507,014,501	100%	1,963,095,620	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai dalam rangka penyelesaian administrasi	100%	100%	600,000	100%	600,000	100%	600,000	100%	720,000	100%	864,000	100%	3,384,000	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	15,780,024	12 Bulan	20,686,000	12 Bulan	18,820,000.00	12 Bulan	19,384,600.00	12 Bulan	19,956,138.00	100%	94,636,762	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dan kelengkapan Perizinan Kendaraan Dinas	5 unit	6 unit	1,388,250	6 unit	1,813,500	7 unit	3,500,000.00	7 unit	3,675,000.00	7 unit	3,858,750.00	100%	14,235,500	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen Keuangan yang terbit dan lancar serta transparan dan akuntabel	4 org	4 org	27,755,000	4 org	37,856,000	4 org	42,000,000	4 org	50,400,000	4 org	60,480,000	4 org	218,491,000	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor demi kenyamanan kerja	12 bln	16 jenis/thn	2,493,000	16 jenis/thn	3,474,375	16 jenis/thn	4,418,375	16 jenis/thn	4,506,743	16 jenis/thn	4,596,877	16 jenis/thn	19,489,370	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 jenis ATK/thn	100 jenis ATK/thn	17,661,750	100 jenis ATK/thn	16,034,975	100 jenis ATK/thn	17,519,550	100 jenis ATK/thn	18,395,528	100 jenis ATK/thn	19,315,304	100 jenis ATK/thn	88,927,106	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.11	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Paket / Tahun	Paket / Tahun	11,000,000	Paket / Tahun	12,183,600	Paket / Tahun	15,000,000	Paket / Tahun	18,000,000	Paket / Tahun	21,600,000	Paket / Tahun	77,783,500	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Pembelian alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	30 bh/jenis/thn	30 bh/jenis/thn	2,000,000	30 bh/jenis/thn	1,500,000	30 bh/jenis/thn	600,000	30 bh/jenis/thn	630,000	30 bh/jenis/thn	661,500	30 bh/jenis/thn	5,391,500	Ktr Camat	
			4.01.4.01.14.01.01.02.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi	2 koran/hari	2 koran/hari	1,740,000	2 koran/hari	1,740,000	2 koran/hr	1,740,000	2 koran/hari	1,774,800	2 koran/hari	1,810,296	2 koran/hari	8,805,096	Ktr Camat	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
			4.01.4.01.14.01.01.02.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Paket	Paket	364 12,750,000	Paket	528 18,500,000	Paket	735 25,750,000	Paket	809 28,325,000	Paket	850 31,157,500	Paket	116,482,500 3.326	Ktr Camat
			4.01.4.01.14.01.01.02.18	Rapat-rapat koordinasional dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi	0	2 50	90,304,000	2 60	105,575,000	2 65	213,375,000	2 70	234,712,500	2 80	258,183,750	10 525 x	902,150,250	Kabupaten, Provinsi dan Pusat
			4.01.4.01.14.01.01.02.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	5 org	5 org	79,405,000	5 org	82,855,000	5 org	82,855,000	5 org	83,683,550	5 org	84,520,386	5 org	413,318,936	Ktr Camat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas Aparatur	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	48,500,000	100%	41,700,000	100%	112,500,000	100%	116,105,000	100%	119,350,750	100%	438,655,750	
			4.01.4.01.14.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya landasan dinas/operasional demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	2 unit	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	45,500,000	1 unit	46,865,000	1 unit	48,270,950	7 unit	140,635,950	
			4.01.4.01.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya meubelair dan alat pendingin	Paket	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
			4.01.4.01.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana komputer	3 unit (1 Komp. PC dan 2 Laptop)	1 Laptop	12,000,000	1 unit	4,500,000	1 unit	12,000,000	1 unit	12,240,000	1 unit	12,484,800	8 unit	53,224,800	Ktr Camat
			4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	1 unit gdg	1 unit gdg	-	2 unit gdg	5,000,000	2 unit gdg	10,000,000	2 unit gdg	10,300,000	2 unit gdg	10,609,000	2 unit gdg	35,909,000	Ktr Camat
			4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya landasan dinas/operasional	5 unit	5 unit	34,500,000	7 unit	29,700,000	7 unit	40,000,000	7 unit	41,200,000	7 unit	42,436,000	7 unit	187,836,000	
			4.01.4.01.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 unit	5 unit	2,000,000	7 unit	2,500,000	7 unit	5,000,000	7 unit	5,500,000	7 unit	6,050,000	7 unit	21,050,000	Ktr Camat
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kualitas Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	4.01.4.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 org	2 org	-	2 org	-	2 org	-	2 org	-	2 org	-	10 org	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (terput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
			4.01.4.01.14.05.03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Aparatur yang memahami mekanisme peraturan perundang-undangan	2 org	2 org	-	2 org	-	2 org	-	2 org	-	2 org	-	10 org	-	
Meningkatkan pelayanan dan pembangunan di berbagai sektor	perencanaan pembangunan lebih terarah	Adanya koordinasi dengan program-program pemberdayaan	4.01.4.01.14.34	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Pelayanan Masyarakat	Presentase Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Pelayanan Masyarakat	18 Kel, 2 desa	18 Kel, 2 desa	26,350,000	18 Kel, 2 desa	39,850,000	18 Kel, 2 desa	73,740,000	18 Kel, 2 desa	77,427,000	18 Kel, 2 desa	81,298,350	18 Kel, 2 desa	298,665,350	
			4.01.4.01.14.01.34.02	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPMP PPK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Generasi Cerdas	18 Kel, 2 desa	18 Kel, 2 desa	16,145,000	18 Kel, 2 desa	-	18 Kel, 2 desa	16,145,000							
			4.01.4.01.14.34.04	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Teraksannya musyawarah pembangunan daerah	18 Kel, 2 desa	18 Kel, 2 desa	26,350,000	18 Kel, 2 desa	39,850,000	18 Kel, 2 desa	47,740,000	18 Kel, 2 desa	50,127,000	18 Kel, 2 desa	52,633,350	18 Kel, 2 desa	218,700,350	
			4.01.4.01.14.34.05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Paket	Paket	-	Paket	-	Paket	26,000,000	Paket	27,300,000	Paket	28,665,000	Paket	81,965,000	
			1020.1020.14.34	Pembinaan Posyandu	Meningkatnya mutu kesehatan	18 Kel, 2 desa	18 Kel, 2 desa	-	18 Kel, 2 desa	-	18 Kel, 2 desa	31,550,000	18 Kel, 2 desa	33,127,500	18 Kel, 2 desa	34,783,875	18 Kel, 2 desa	99,461,375	
			4.01.4.01.14.34.04	Perfombaan Desa/Kelurahan	meningkatkan kemandirian masyarakat	18 Kel, 2 desa	18 Kel, 2 desa	-	18 Kel, 2 desa	-	18 Kel, 2 desa	24,550,000	18 Kel, 2 desa	25,777,500	18 Kel, 2 desa	27,066,375	18 Kel, 2 desa	77,383,875	
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dan komunikasi dalam pelayanan public	Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan public secara baik, cepat dan akurat	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	5 dokumen	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA	5 dokumen	-	-	5 Dok	-	Ktr Camat								


  
 Lantuka, Januari 2018  
 Camat Lantuka  
**YOSEP TIT DOLLUSP**  
 Pembina Tk. I  
 NIP : 19620126 198603 1 011

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	CAPAIAN KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										OPD penanggung jawab	Ket		
			Tahun 2018 (Tahun 1)		Tahun 2019 (Tahun 2)		Tahun 2020 (Tahun 3)		Tahun 2021 (Tahun 4)		Tahun 2022 (Tahun 5)				Kondisi kinerja pada akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	URUSAN WAJIB															
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	262,877,024	100%	302,818,450	100%	426,177,925	100%	464,207,720	100%	507,014,501	100%	1,963,095,620	Kantor Camat Larantuka	
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	48,500,000	100%	41,700,000	100%	112,500,000	100%	116,105,000	100%	119,850,750	100%	438,655,750	Kantor Camat Larantuka	
4.01.4.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Dumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Dumber Daya Aparatur													Kantor Camat Larantuka	
4.01.4.01.14.34	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Presentase Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat	18 Kel, 2 Desa	26,350,000	18 Kel, 2 Desa	39,850,000	18 Kel, 2 Desa	129,840,000	18 Kel, 2 Desa	77,424,000.00	18 Kel, 2 Desa	81,298,350	18 Kel, 2 Desa	354,762,350	Kantor Camat Larantuka	
JUMLAH				337,727,024		384,368,450		668,517,925		657,736,720		708,163,601		2,756,513,720		

Larantuka, Januari 2018  
Camat Larantuka

*(Signature)*

YUSEF DOLLUSP  
Pembina Tk. I  
NIP : 19620126 198603 1 0111

FLORES TIMUR

**BAB VII :**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1 :  
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	93,29%	87,8	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	84,72	86,5	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	87,8	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	-	87,8	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

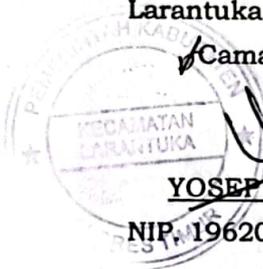
Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka Tahun 2017 - 2022 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Larantuka, Januari 2018.

Camat Larantuka,

  
YOSEPTUA DOLLU, SP

NIP. 19620126 198603 1 011